



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
u.b. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis  
seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 43/Dj.I/Dt.I.I.3/PP.00/01/2019  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah sebagaimana tercantum dalam DIPA Program Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019 (Output 2129.001: Madrasah dan RA Yang Terakreditasi), dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Tahun Anggaran 2019 difokuskan untuk mendukung peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik dan akuntabel diharapkan dapat membantu madrasah dalam meningkatkan aspek "Tepat Guna" dan "Tepat Sasaran" sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar nasional pendidikan.
2. Pencapaian output kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi oleh Direktorat KSKK Madrasah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sebagaimana terlampir.
3. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

Suboutput/Tahapan/Komponen Kegiatan	Pelaksana	Tahun 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Penetapan Madrasah Sasaran oleh Kanwil Kemenag setempat	Kanwil												
b. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM Zona 1 (terlampir)	Dit KSKK Madrasah												
c. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM Zona 2 (terlampir)	Dit KSKK Madrasah												

d. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM Zona 3 (terlampir)	Dit KSKK Madrasah																					
e. Workshop Perencanaan dan Penganggaran Madrasah Berbasis Kinerja (Piloting Penerapan RKM-el)	Kanwil																					
f. Pendampingan Madrasah	Kanwil																					
g. Monitoring	Dit KSKK dan Kanwil																					
h. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama Madrasah	Dit KSKK Madrasah																					

4. Ditjen Pendidikan Islam bekerjasama dengan Bank Dunia akan menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator RKAM-el dari masing-masing provinsi pada bulan Februari 2019.
5. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melaksanakan kegiatan Workshop Perencanaan dan Penganggaran Madrasah Berbasis Kinerja di masing-masing Kanwil dengan melibatkan madrasah sasaran yang telah ditetapkan dan mendayagunakan fasilitator provinsi yang telah dilatih untuk melakukan diseminasi kegiatan di provinsi.
6. Oleh karena itu, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menetapkan daftar madrasah sasaran yang akan mendapatkan bimbingan teknis/pelatihan/workshop tentang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (RKM-el) sesuai dengan kuota yang ada di dalam dokumen DIPA, dengan kriteria madrasah sasaran sebagai berikut:
    - 1) mempunyai izin operasional RA/MI/MTs/MA (pembagian alokasi madrasah per jenjang dilakukan secara proporsional);
    - 2) mempunyai peralatan komputer/laptop yang memadai untuk menunjang kegiatan administrasi di madrasah;
    - 3) mempunyai operator komputer yang mempunyai keahlian yang memadai;
    - 4) mempunyai komitmen untuk penerapan sistem RKAM-el di Madrasah secara bertahap;
    - 5) 70% dikhususkan untuk Madrasah Negeri/Swasta yang siap menjadi Madrasah Rujukan implementasi penerapan sistem RKAM-el (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Elektronik);
    - 6) 30% untuk RA/Madrasah yang akan melakukan akreditasi/akreditasi ulang pada tahun 2019;
  - b. menetapkan 3 (tiga) nominasi Fasilitator Provinsi yang akan dilatih menjadi Fasilitator Provinsi yang berasal dari unsur:
    - 1) Kepala Seksi/JFU Kelembagaan dan Sistem Informasi/Pendis pada Kanwil Kemenag Provinsi;
    - 2) JFU Operator BOS/BOP pada Kanwil Kemenag Provinsi;
    - 3) Kepala Madrasah/Pengawas Madrasah yang mempunyai kompetensi menjadi pelatih/fasilitator.

- c. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dimaksud dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur KSKK Madrasah.
- d. Daftar madrasah sasaran dan daftar nominasi fasilitator provinsi (peserta pelatihan) agar dapat dikirim ke Direktorat KSKK Madrasah melalui Subdit Kelembagaan dan Kerja Sama paling lambat tanggal 1 Februari 2019.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan,  
dan Kesiswaan Madrasah,



Tembusan:  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

### KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Agama RI
Unit Eseleon I/II	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam/Direktorat Pendidikan Madrasah
Program	:	Pendidikan Islam
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan Madrasah
Kegiatan	:	Peningkatan Akses, Mutu, Daya Saing, dan Relevansi Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA)
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	Madrasah dan RA Yang Terakreditasi
Komponen	:	Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah
Volume	:	2.000 Madrasah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Madrasah

#### A. Latar belakang

Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik merupakan faktor penting yang dapat berkontribusi pada pemenuhan standar mutu akreditasi madrasah. Namun, sistem perencanaan dan penganggaran yang ada belum sepenuhnya didasarkan pada pencapaian target Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terutama bagi madrasah swasta. Sistem perencanaan dan penganggaran di madrasah negeri dapat dimonitor oleh Kemenag melalui sistem monitoring terpadu di aplikasi DIPA dan sejenisnya. Namun, di madrasah swasta hal ini sulit dimonitor. Dana yang berasal dari pihak luar yang diterima oleh madrasah tidak tercatat di Kemenag. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan target untuk mencapai SNP dan SPM yang juga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas madrasah.

Untuk meningkatkan kemampuan Kemenag dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran di dalam kelas, program ini akan menerapkan **Sistem Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah** berbasis kinerja secara elektronik (RKAM-el) Penerapan sistem RKAM-el ini memungkinkan madrasah menggunakan dana transfer seperti dana BOS serta sumber dana lainnya untuk memenuhi SPM dan SNP. Penggunaan sistem perencanaan dan penganggaran madrasah berbasis kinerja secara elektronik juga memungkinkan dilakukannya monitoring dan pemberian dukungan bagi lembaga pemberi layanan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

## B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pencapaian keluaran ini adalah:

1. 2.000 Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) yang menjadi sasaran utama pelaksanaan program ini.
2. Para *stakeholder* internal, seperti siswa, guru, kepala madrasah, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan madrasah lainnya atas meningkatnya mutu layanan pendidikan madrasah melalui peningkatan mutu akreditasi madrasah.

## C. Strategi Pencapaian Keluaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola oleh Ditjen Pendidikan Islam dan Kanwil Kemenag Provinsi.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan untuk mendukung keluaran (*output*) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Penetapan Madrasah Sasaran

Madrasah sasaran kegiatan ini ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi berdasarkan kriteria madrasah sasaran sebagai berikut:

- 1) mempunyai izin operasional RA/MI/MTs/MA (pembagian alokasi madrasah per jenjang dilakukan secara proporsional);
- 2) mempunyai peralatan komputer/laptop yang memadai untuk menunjang kegiatan administrasi di madrasah;
- 3) mempunyai operator komputer yang mempunyai keahlian yang memadai;
- 4) mempunyai komitmen untuk penerapan sistem RKAM-el di Madrasah secara bertahap;
- 5) 70% dikhususkan untuk Madrasah Negeri/Swasta yang siap menjadi Madrasah Rujukan implementasi penerapan sistem RKAM-el (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Elektronik);
- 6) 30% untuk RA/Madrasah yang akan melakukan akreditasi/akreditasi ulang pada tahun 2019;

#### b. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM (3 Zona)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat KSKK Madrasah. Kegiatan ini berbentuk *fullboard meeting* 3 (lima) hari. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) zona. Sasaran peserta kegiatan ini adalah:

- 1) Kepala Seksi/JFU Kelembagaan dan Sistem Informasi/Pendis pada Kanwil Kemenag Provinsi;
- 2) JFU Operator BOS/BOP pada Kanwil Kemenag Provinsi;
- 3) Kepala Madrasah/Pengawas Madrasah yang mempunyai kompetensi menjadi pelatih/fasilitator.

- c. **Workshop Perencanaan dan Penganggaran Madrasah Berbasis Kinerja (Piloting Penerapan E-RKM)**  
Komponen kegiatan ini berbentuk *fullday meeting/fullboard meeting*/sewa ruang pertemuan di madrasah/PSBB/lainnya yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi dengan mendayagunakan fasilitator provinsi yang telah dilatih oleh Ditjen Pendis bekerja sama dengan Bank Dunia melalui kegiatan TOT/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM.
- d. **Pendampingan Madrasah**  
Komponen kegiatan ini dapat berbentuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh fasilitator provinsi/pengawas madrasah/tim pendamping KKM yang ditugaskan oleh Kanwil Kemenag Provinsi dalam rangka melakukan pendampingan kepada madrasah yang telah dilatih melalui kegiatan Bimtek/Workshop Perencanaan dan Penganggaran Madrasah Berbasis Kinerja yang diadakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan madrasah yang telah mendapatkan Bimtek/Workshop melaksanakan rencana tindak lanjut dari kegiatan Bimtek/Workshop.
- e. **Monitoring Pelaksanaan Kegiatan**  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas yang bertujuan untuk memastikan implementasi kegiatan Bimtek dan bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Juknis yang ditetapkan.
- f. **Workshop Evaluasi Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama Madrasah**  
Komponen kegiatan ini berbentuk *fullboard meeting* yang dilaksanakan oleh Direktorat KSKK Madrasah selama 3 (tiga) hari. Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan program kelembagaan dan kerjasama madrasah. Sasaran kegiatan ini adalah kepala bidang pendidikan madrasah atau kasi kelembagaan dan sistem informasi kanwil kemenag provinsi.

Waktu pelaksanaan untuk mencapai keluaran ini adalah sebagai berikut:

Suboutput/Tahapan/Komponen Kegiatan	Pelaksana	Tahun 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Penetapan Madrasah Sasaran oleh Kanwil Kemenag setempat	Kanwil	■											
b. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM Zona 1	Dit KSKK Madrasah		■										
c. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM Zona 2	Dit KSKK Madrasah		■										
d. Peningkatan Kapasitas Fasilitator E-RKM Zona 3	Dit KSKK Madrasah		■										
e. Workshop Perencanaan dan Penganggaran Madrasah Berbasis Kinerja (Piloting Penerapan RKM-el)	Kanwil			■	■	■							
f. Pendampingan Madrasah	Kanwil			■	■	■	■	■					
g. Monitoring	Dit KSKK dan Kanwil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

h. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Program Kelembagaan dan Kerjasama Madrasah	Dit KSKK Madrasah													
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Kurun waktu yang digunakan dalam pencapaian keluaran ini adalah 1 (satu) tahun anggaran 2019.

**E. Biaya Yang Diperlukan**

Pelaksanaan output ini dibebankan pada DIPA Ditjen Pendidikan Islam dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tahun 2019.

Demikian Kerangka Acuan Kerja / *Term of Reference* dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Januari 2019

Direktur KSKK Madrasah,



A. Umar

## Lampiran 1

## Daftar Sebaran Alokasi Output Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Per Provinsi

No	Provinsi	Volume	Unit Cost	Jumlah Anggaran
1	Aceh	80 Lembaga	8.000.000	640.000.000
2	Bali	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
3	Banten	80 Lembaga	8.000.000	640.000.000
4	Bengkulu	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
5	DI Yogyakarta	30 Lembaga	8.000.000	240.000.000
6	DKI Jakarta	30 Lembaga	8.000.000	240.000.000
7	Gorontalo	30 Lembaga	8.000.000	240.000.000
8	Jambi	60 Lembaga	8.000.000	480.000.000
9	Jawa Barat	200 Lembaga	8.000.000	1.600.000.000
10	Jawa Tengah	160 Lembaga	8.000.000	1.280.000.000
11	Jawa Timur	220 Lembaga	8.000.000	1.760.000.000
12	Kalimantan Barat	40 Lembaga	8.000.000	320.000.000
13	Kalimantan Selatan	40 Lembaga	8.000.000	320.000.000
14	Kalimantan Tengah	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
15	Kalimantan Timur	30 Lembaga	8.000.000	240.000.000
16	Kalimantan Utara	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
17	Kep. Bangka Belitung	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
18	Kepulauan Riau	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
19	Lampung	90 Lembaga	8.000.000	720.000.000
20	Maluku	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
21	Maluku Utara	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
22	Nusa Tenggara Barat	140 Lembaga	8.000.000	1.120.000.000
23	Nusa Tenggara Timur	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
24	Papua	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
25	Papua Barat	20 Lembaga	8.000.000	160.000.000
26	Riau	70 Lembaga	8.000.000	560.000.000
27	Sulawesi Barat	30 Lembaga	8.000.000	240.000.000
28	Sulawesi Selatan	80 Lembaga	8.000.000	640.000.000
29	Sulawesi Tengah	60 Lembaga	8.000.000	480.000.000
30	Sulawesi Tenggara	40 Lembaga	8.000.000	320.000.000
31	Sulawesi Utara	30 Lembaga	8.000.000	240.000.000
32	Sumatera Barat	40 Lembaga	8.000.000	320.000.000
33	Sumatera Selatan	80 Lembaga	8.000.000	640.000.000
34	Sumatera Utara	120 Lembaga	8.000.000	960.000.000

Jakarta, 15 Januari 2019

Direktur KSKK Madrasah,



A. Umar